



## IMPLEMENTASI PROGRAM PADAT KARYA DI KELURAHAN CIBEBER KECAMATAN CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI

**Dimas Setiawan<sup>1)</sup>**

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini berjudul "Implementasi Program Padat Karya di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Masalah dalam penelitian ini adalah imlementasi Program Padat Karya di Kelurahan Cibeber belum optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Informan: 1 orang Lurah; 1 orang Ketua LPM; 1 orang Ketua RW; 1 orang Ketua Karang Taruna; 1 orang tokoh masyarakat; dan 2 orang masyarakat. Hasil penelitian yang di dapat yaitu Keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Program Padat Karya, namun jika melihat tingkat Pendidikan masih perlu ditingkatkan, sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Kelurahan Cibeber dalam kondisi baik, Dalam Program Padat Karya, Kelurahan Cibeber mendapatkan kucuran dana sekitar Rp.370.000.000. dalam Program Padat Karya aparat telah memiliki pengetahuan, aparat pelaksana menyadari akan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Program Padat Karya dapat terlaksana dengan baik melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian berupa monitoring dan evaluasi secara berjenjang. Hambatan-hambatan yang muncul adalah Sikap masyarakat, dimana masih ada anggapan dari masyarakat Kelurahan Cibeber bahwa masalah pengangguran adalah masalah masing-masing individu. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut: Pemerintah Kelurahan Cibeber mengedukasi masyarakat secara intensif, meningkatkan Komunikasi antara Pemerintah dan Masyarakat, menghimbau kepada Ketua RW agar menggalakan iuran swadaya masyarakat.

**Kata Kunci:** Program Padat Karya, Kelurahan, Masyarakat.

### **Abstract**

*This research is entitled "Implementation of Labor Intensive Program in Cibeber Village, South Cimahi Subdistrict, Cimahi City. The problem in this research is that the implementation of the Labor Intensive Program in Cibeber Village is not optimal. The method used in this research is descriptive method, with qualitative approach. Informants: 1 Head of Lurah; 1 Head of LPM; 1 Head of RW; 1 Head of Youth Organization; 1 community leader; and 2*

*community members. The results of the research obtained are the successful implementation of Local Government policies related to the Labor Intensive Program, but if you look at the level of education, it still needs to be improved, the work facilities and infrastructure owned by Cibeber Village are in good condition, in the Labor Intensive Program, Cibeber Village gets funding of around Rp.370,000,000. in the Labor Intensive Program, the apparatus already has knowledge, the implementing apparatus is aware of its duties, functions and responsibilities. The Labor Intensive Program can be implemented well through coaching, supervision and control in the form of monitoring and evaluation in stages. The obstacles that arose were community attitudes, where there is still an assumption from the Cibeber Village community that the problem of unemployment is the problem of each individual. Efforts made to overcome these obstacles: The Cibeber Village Government educates the community intensively, improves communication between the government and the community, and urges RW heads to promote self-help contributions from the community.*

**Keywords:** *Labor Intensive Program, Subdistrict, Community.*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesiadan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Segenap upaya pembangunan dituangkan dalam berbagai kebijakan yang ditujukan bagi masyarakat yang harus dibangun kehidupannya dan sekaligus sebagai sumber daya pembangunan yang harus ditingkatkan kualitas dan kemampuannya.

Dalam upaya melaksanakan pembangunan yang lebih merata, Negara Indonesia dibagi ke dalam daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1

amandemen ke dua yang berbunyi: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang".

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa: "Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Salah satu dampak dari pelaksanaan pembangunan adalah munculnya masalah kemiskinan. Mubyarto (1997:35) mengemukakan kemiskinan adalah: "Kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia meliputi sandang- pangan-papan, kebutuhan akan hidup sehat, dan kebutuhan akan pendidikan dasar bagi anak-anak".

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan. Salah satunya adalah Program Padat Karya. Padat karya merupakan kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin. Tujuan utama dari program padat karya adalah untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat, terutama yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap.

Salah satu Pemerintah Daerah yang menggulirkan Program Padat Karya adalah Pemerintah Kota Cimahi. Dimana kegiatan Program Padat Karya pada tahun 2023 di Kota Cimahi diikuti

masyarakat di tiap Kelurahan sesuai kriteria, selain mendukung program pembangunan Pemkot Cimahi, kegiatan tersebut juga dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Padat Karya (*cash for work*) menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Padat karya adalah pengolahan sumber daya manusia untuk bekerja di lapangan pekerjaan yang dibuat oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Kebijakan padat karya diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak bisa bekerja karena ketidakmampuannya untuk berkompetisi mendapatkan pekerjaan, menganggur atau tidak memiliki penghasilan tetap.

Dasar hukum implementasi program Padat Karya di Kota Cimahi adalah Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 500/kep.994-ekosda/2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan One Product One RW, peduli Lingkungan Bersih dan Padat Karya. Pelaksanaan program padat karya disiapkan jajaran RW, mulai dari perencanaan, yaitu proposal yang berisi penentuan jenis kegiatan, kebutuhan pekerja, kebutuhan anggaran, kebutuhan alat dan bahan, kemudian pelaksanaan, pembayaran upah serta pelaporan.

Adapun yang dimaksud dengan kebijakan menurut Thomas R. Dye (dalam Islamy, 2009:18) mendefinisikan kebijaksanaan negara sebagai: "*is whatever governments choose to do or not to do.* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan)".

Mustopawidjaja dan Tjokroamidjoyo (2008:111) mengemukakan pendapatnya bahwa Kebijaksanaan pemerintah yang dimaksud di sini adalah setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah (Presiden, Menteri, Gubernur, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal dan seterusnya) dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintahan ataupun pembangunan guna mengatasi permasalahan tertentu atau

mencapai tujuan tertentu, ataupun dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, dan lazimnya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertentu atau bentuk keputusan formal.

Padat karya merupakan kegiatan pembangunan poyek yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin. Menggunakan tenaga manusia dalam jumlah besar. Tujuan utama dari program padat karya adalah untuk membuka lapangan kerja bagi keluarga-keluarga miskin atau kurang mampu yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap. Proyek padat karya merupakan program pemerintah melalui Bappenas untuk memberi lapangan kerja terutama yang kehilangan pekerjaan pada masa sulit. Sebagai salah satu contoh adanya program padat karya seperti pembersihan parit dan gorong-gorong di pinggiran jalan Cibeber maupun di lingkungan-lingkungan yang ada di Kelurahan Cibeber. Dalam pelaksanaan program padat karya ini pekerja lebih kurang 50 orang dan honor harian pekerja perorangan mendapatkan Rp. 150.000,00.

Masalah yang dihadapi dalam program kerja padat karya adalah faktor upah yang ideal bagi seseorang pekerja. Dalam mendorong pembangunan pemerintah harus lebih mementingkan proyek-proyek padat karya agar kegiatan tersebut dapat mendorong kepentingan golongan ekonomi rendah. Program penciptaan kerja padat karya cenderung menguntungkan pekerja pria ketimbang perempuan.

Dalam penelitian pen jajagan, peneliti menemukan indikasi bahwa implementasi Program Padat Karya di Kelurahan Cibeber belum optimal, hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut:

- 1) Kurangnya sumber daya manusia yang ahli, terampil dan

berpengalaman dalam program ini, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan fisik infrastruktur karena kebanyakan yang terlibat dalam proyek ini adalah masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja dari perusahaan atau pabrik, masyarakat yang bekerja serabutan bahkan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan.

- 2) Berbagai administrasi proyek seperti laporan harian dan laporan mingguan, termasuk laporan keuangan di pegang oleh Ketua RW dan bendahara RW sehingga rawan dari penyalahgunaan keuangan atau tidak sesuai peruntukannya.
- 3) Kurangnya pengawasan dari aparat kewilayahan di tingkat atasnya dalam hal ini Pemerintah Kelurahan Cibeber, dimana pengawasan yang dilakukan hanya bersifat administratif terutama dalam hal penggunaan keuangan, sementara pengawasan fisik jarang dilakukan.

Dari latar belakang tersebut, peneliti ingin mempelajari lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Implementasi Program Padat Karya di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi”**.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan/menggambarkan data pada masa sekarang (sedang terjadi). Nawawi (2001,63-64) mengemukakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”. Adapun ciri-ciri pokok metode deskriptif adalah:

1. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual.
2. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya.

Adapun pendekatan dari metode deskriptif yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif menurut Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln (dalam Alwasilah, 2002:105) bahwa: “metode inilah yang lebih mudah diadaptasikan dengan realitas yang beragam dan saling berinteraksi. Mereka juga dinilai lebih sensitif terhadap segala aspek dan perubahan yang saling mempengaruhi yang bakal dihadapi oleh peneliti”.

Pengertian metode kualitatif, menurut Robert C. Bogdan dan Steven J. Taylor (dalam Moleong 2002:3) adalah: “metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara holistik (utuh)”. Menurut Usman dan Akbar (2001:81), metode penelitian kualitatif adalah: Dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif.

Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaktif tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Responden dalam metode kualitatif berkembang terus (*snowball*) secara bertujuan (*pusposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Alat pengumpul data atau instrumen penelitian dalam metode kualitatif ialah si peneliti sendiri. Jadi penelitian merupakan *key instrument*, dalam mengumpulkan data si peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif. Memperhatikan penjelasan tersebut di atas

maka peneliti memakai metode kualitatif dengan alasan:

1. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa objek atau *focus of interest* yang menjadi perhatian peneliti menyangkut studi yang membahas Implementasi Program Padat Karya di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi yang sangat kompleks dan tidak mungkin untuk direduksi ke dalam suatu sudut pandang atau realitas.
2. Tujuan penelitian ini diwarnai oleh adanya interaksi dari kondisi empiris di lapangan. Untuk itu berinteraksi dengan para responden, antara lain dengan wawancara dengan latar alamiah, agar memperoleh pemahaman *emic* (menurut persepsi responden bukan persepsi peneliti) ikhwal kepercayaan, tujuan dan alat untuk mencapai tujuan itu. Jadi data diperoleh melalui mediator yang selalu responsif terhadap konteks. Penelitian ini relevan dengan penelitian naturalis yang memadukan asumsi dan adanya saling pengaruh antara peneliti dengan responden.
3. Selain itu peneliti dapat melihat langsung dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan objek penelitian, hal ini berarti peneliti menjadi instrumen penelitian. Sebagian besar data yang dikumpulkan berupa data deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian. Peneliti berusaha mencari makna, dengan memahami perilaku manusia dalam konteks yang lebih luas dilihat dari kerangka pemikiran dan peranan responden.

## **PEMBAHASAN**

Pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang berkelanjutan yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai tugas pencapaian tujuan nasional sebagaimana telah ditegaskan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945. Dalam upaya menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah berwenang

untuk mengurus urusan daerahnya sendiri yang masuk dalam lingkup kewenangan pemerintah daerah. Setiap daerah berhak untuk membuat dan merumuskan kebijakan untuk daerahnya guna meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan daerah.

Pemerintah Kota Cimahi menggulirkan program Padat Karya tahun 2023. Kegiatan diikuti masyarakat di tiap kelurahan sesuai kriteria, selain mendukung program pembangunan Pemkot Cimahi kegiatan tersebut juga dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan padat karya (*cash for work*) menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Padat karya adalah pengolahan sumber daya manusia untuk bekerja di lapangan pekerjaan yang dibuat oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah.

Salah satu kelurahan yang melaksanakan kebijakan pemerintah daerah tentang Program Padat Karya adalah Kelurahan Cibeber yang berada di wilayah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Dalam pembahasan skripsi yang berjudul Implementasi Program Padat Karya di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, peneliti membagi ke dalam tiga sub bab pembahasan yaitu:

1. Implementasi Program Padat Karya di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
2. Hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi Program Padat Karya di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi; dan
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Cibeber dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dalam Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Skripsi yang berjudul Implementasi Program Padat

Karya di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Padat Karya di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, yaitu:

a. Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Program Padat Karya, tidak terlepas dari adanya Komunikasi yang baik antara Pemerintah Daerah kepada aparat wilayahnya serta kepada masyarakat, Pemerintah Kota Cimahi mulai menggulirkan program Padat Karya tahun anggaran 2024. Kegiatan digelar tiap kelurahan, masyarakat dilibatkan dalam program pembangunan sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Titik awal Gebyar Padat Karya diawali di Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara. Kegiatan dihadiri Ketua RW se- kelurahan Pasirkaliki, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tamu undangan lainnya.

b. Sumber daya, jika dilihat dari jumlah aparat sudah memadai, namun demikian jika melihat tingkat Pendidikan masih perlu ditingkatkan mengingat aparat Kelurahan merupakan birokrasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Kelurahan Cibeber dalam kondisi baik dalam menunjang tugas-tugas pemerintahan yang meliputi: tugas pembangunan, tugas pelayanan publik dan tugas pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam mendukung pelaksanaan Program Padat Karya. Dalam Program Padat Karya, Kelurahan Cibeber mendapatkan kucuran dana sekitar Rp.370.000.000,-

c. Disposisi atau sikap pelaksana, dalam Program Padat Karya aparat telah memiliki pengetahuan, aparat pelaksana menyadari akan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, Lurah Cibeber telah melakukan berbagai metode diantaranya dengan pemberian balas jasa kepada aparat yang berhasil melaksanakan tugas dan pemberian *reward*.

- d. Struktur birokrasi, Program Padat Karya dapat terlaksana dengan baik melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian berupa monitoring dan evaluasi secara berjenjang sehingga pengelolaan keuangannya pun dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban dalam Program Padat Karya dapat dilihat dari pembagian peran yang diemban antara Pemerintah Kota Cimahi, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan dan Ketua RW sebagai pelaksana operasional di lapangan.
2. Hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi Program Padat Karya di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, antara lain:
- a. Sikap masyarakat, dimana masih ada anggapan dari masyarakat Kelurahan Cibeber bahwa masalah pengangguran adalah masalah masing-masing individu sehingga Pemerintah tidak perlu memikirkan masalah pengangguran tersebut.
  - b. Anggaran, dalam Program Padat Karya belum memadai dan mencukupi untuk memfasilitasi pembangunan atau perbaikan infrastruktur seperti perbaikan jalan atau gang-gang di sekitar Kelurahan Cibeber.
  - c. Beberapa pekerja yang berasal dari penduduk sekitar mengatakan bahwa upah yang diterima sangat minim yaitu sebesar Rp.75.000,- dan ini masih jauh dari Upah Minimum Kota Cimahi.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Cibeber dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, antara lain:
- a. Pemerintah Kelurahan Cibeber mengedukasi masyarakat secara intensif; Pemerintah dan berbagai pihak terkait harus berupaya untuk memberikan pengetahuan yang benar kepada masyarakat, terutama mengenai masalah-masalah

sosial seperti penganggran yang harus ditanggulangi secara bersama-sama antara Pemerintah, Masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya.

- b. Pemerintah Kelurahan Cibeber meningkatkan Komunikasi antara Pemerintah dan Masyarakat; Komunikasi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat harus harmonis. Dalam hal ini, pemerintah mau tidak mau harus "legowo" untuk mendengarkan terlebih dahulu apa sebenarnya keinginan masyarakat, dimana kebijakan yang dilaksanakan tentunya harus bermanfaat bagi semua pihak.
- c. Pemerintah Kelurahan Cibeber menghimbau kepada Ketua RW agar menggalakan iuran swadaya masyarakat, yang penggunaannya nanti bisa disertakan untuk pembangunan fisik di lingkungan sekitarnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Alwasilah, A. Chaedar. 2002. *Dasar-Dasar Merancang Dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dartanto, Teguh. 2015. *Gender dan Kemiskinan di Indonesia*. Malang: Brawijaya Press.
- Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)* (Penterjemah, Ricky Istamto). Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Kansil. 1993. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Jakarta:

Rineka Cipta.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya.

Musanef. 1985. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta:

Masagung. Mustopawidjaya A.R dan Bintoro Tjokroamidjojo. 2008. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan: Perkembangan Teori dan Terapan*. Jakarta:LP3ES.

Nasution. 1996. *Metode Penelitian Naturlalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito. Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Pamudji. 1995. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sumoprawiro, Hariyoso. 2002. *Pembangunan Birokrasi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Peradaban.

Suradinata, Ermaya. 1998. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Bandung: Citra Grafika.

Suryaningrat, Bayu. 1988. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara.

Syafiie, Inu Kencana. 1992. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Eresco. Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.

Wahab, Solihin Abdul. 1997. *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Wresniwiro. 2012. *Membangun Republik Desa*. Jakarta: Visimedia.

**Dokumen:**

Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Dasar RI 1945*.

Jakarta: Sinar Grafika.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004  
Tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014  
Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Republik Indonesia. 2023. Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor  
500/kep.994-ekosda/2023 Tentang *Tata Cara Pelaksanaan  
Kegiatan One Product One RW, peduli Lingkungan Bersih dan  
Padat Karya*.

**Sumber Lainnya:**

Santoso, Amir. 1989. "Analisa Kebijakan Publik;  
*Masalah dan Pendakatan*" Jurnal Ilmu Politik 4. Jakarta :  
Gramedia.

